

BAB I

PENDAHULUAN

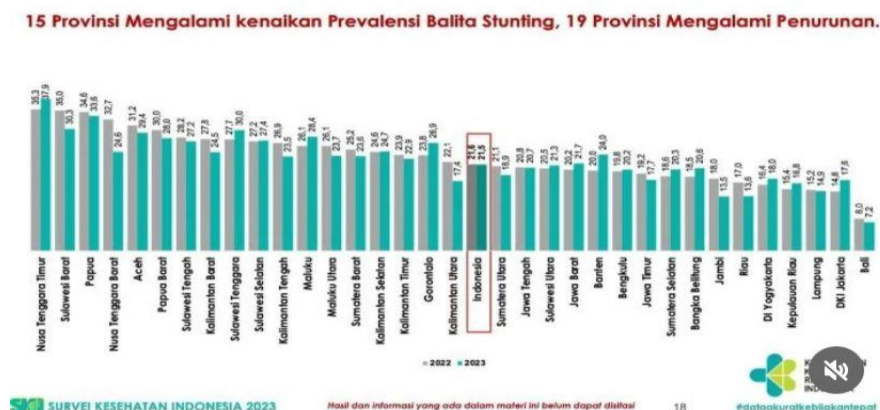
1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu persoalan kesehatan krusial yang kini menjadi fokus perhatian di tingkat nasional. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting merupakan kondisi terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang serta infeksi yang terjadi secara berulang. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki postur dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar pertumbuhan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Masalah stunting termasuk kedalam fokus dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada tujuan kedua yang mencakup penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan (Haskas, 2020).

Stunting tidak hanya dialami oleh keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, tetapi juga dapat terjadi pada keluarga yang memperlihatkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih unggul, dengan persentase yang bahkan melebihi 40% (Haskas, 2020). Berbagai faktor yang memicu Tingginya prevalensi kasus stunting di Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain, misalnya karena kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pertumbuhan otak dan tumbuh kembang yang pesat. Penyebab stunting juga dipicu oleh faktor geografis, kurangnya edukasi dan pengetahuan pada ibu hamil serta menyusui, sanitasi yang buruk di tempat tinggalnya, seperti air bersih yang kurang layak dan akses fasilitas kesehatan yang terbatas (Mastura, 2023).

Stunting telah diakui sebagai masalah kepentingan nasional, sehingga pemerintah telah meluncurkan program upaya preventif terhadap stunting dan mengembangkan kebijakan nasional yang difokuskan pada percepatan penanganan masalah stunting (Anastasia et al., 2023). Pernyataan ini tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang memiliki tujuan akhir berupa capaian target penurunan angka stunting ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024. Sasaran tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dialokasikan untuk program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya penanggulangan stunting juga diformulasikan melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Peraturan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa (Eko, 2024).

Pada tahun 2023, prevalensi stunting nasional berada di angka 21,5%. Terdapat 15 provinsi yang prevalensi stunting nya mengalami kenaikan, sedangkan 19 provinsi lainnya prevalensi stunting nya menurun. Berikut data prevalensi stunting berdasarkan provinsi menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023:



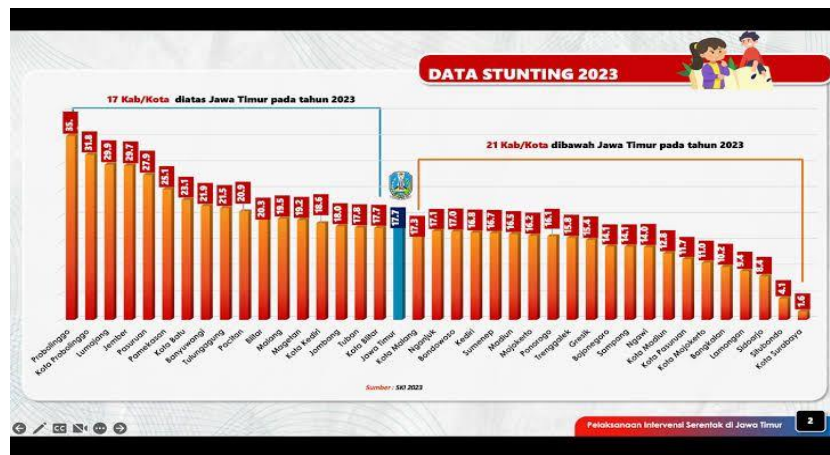
Gambar 1.1 Data Prevalensi Stunting Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber: Survei Kesehatan Indonesia 2023

Diakses pada 07 November 2024

Menurut data tersebut, prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 tercatat mencapai 19,2%. Namun, di tahun 2023, Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 17,7% yang berarti angka ini lebih rendah dari prevalensi stunting nasional yang berada di angka 21,5% dan pemerintah provinsi di angka 20,13%. Penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur masih terus di upayakan hingga mencapai target yang telah ditetapkan, karena stunting merupakan tantangan besar yang butuh penanganan efektif, karena memberikan pengaruh yang besar dalam peningkatan mutu sumber daya manusia di masa mendatang. Dampak stunting tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas kesehatan balita secara umum, termasuk kemampuan kognitif dan daya pikirnya. Anak-anak dianggap sebagai aset penting di masa depan. Jika banyak balita yang mengalami stunting, maka diperkirakan kualitas sumber daya manusia di masa depan akan terhambat, sehingga mereka akan merasa kesulitan berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara lain di tengah dinamika global (Dunn et al., 2011).

Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih melaporkan angka prevalensi stunting yang melebihi rata-rata provinsi. Di sisi lain, terdapat 21 kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga berada di bawah rata-rata tingkat provinsi.



Gambar 1.2 Data Prevalensi Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

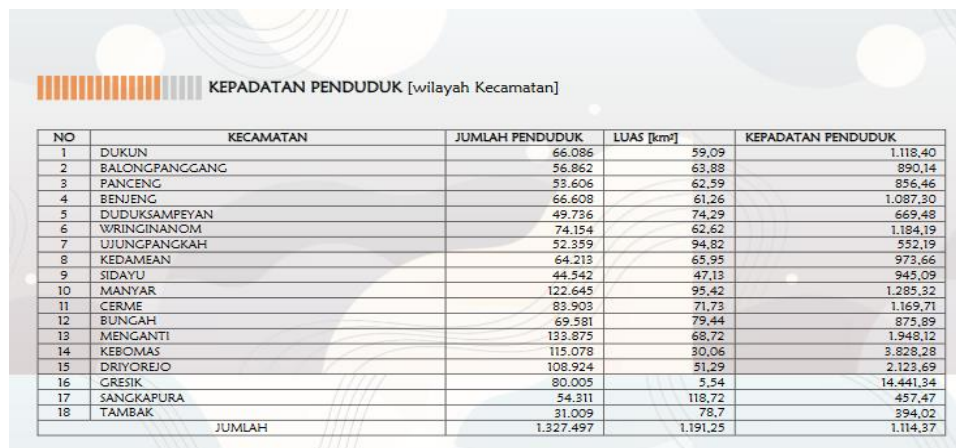
Sumber: Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

Diakses pada 07 November 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik termasuk kedalam kategori 21 kabupaten/kota yang berhasil prevalensi stuntingnya dibawah Provinsi Jawa Timur, meskipun demikian, pencapaian tersebut belum sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020–2024, yakni sebesar 14%. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwasannya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Gresik tidak bisa bersaing dengan sumber manusia dari daerah bahkan negara lainnya.

Hal ini merupakan salah satu alasan karena Kabupaten Gresik menjadi penopang industrialisasi yang masuk pada ring satu industri Jawa Timur dan memiliki banyak industri sedang hingga besar yang tersebar (Hakiim, 2020). Dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, Kabupaten Gresik menjadi kawasan industri terbesar. Total luas lahan industri di Jawa Timur saat ini mencapai 3.374 *hektare*, di mana 37%-nya berada di Kabupaten Gresik. Ferry Salant, kepala penelitian di Colliers Indonesia, mengatakan Kabupaten Gresik merupakan lokasi yang populer untuk mendirikan kawasan industri karena aksesnya yang mudah dari kota Surabaya.

Adanya hal ini akan mengakibatkan tingginya mobilitas dan kepadatan penduduk yang sebagian berasal dari pendatang luar kota untuk bekerja di Kabupaten Gresik. Berikut data berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2024:



NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS [km²]	KEPADATAN PENDUDUK
1	DUKUN	66.086	59,09	1.118,40
2	BALONGPANGGANG	56.862	63,88	890,14
3	PANCENG	53.606	62,59	856,46
4	BENJENG	66.608	61,26	1.087,30
5	DUDUKSAMPEYAN	49.736	74,29	669,48
6	WRINGINANOM	74.154	62,62	1.184,19
7	UJUNGPAKCAH	52.359	94,82	552,19
8	KEDAMEAN	64.213	65,95	973,66
9	SIDAYU	44.542	47,13	945,09
10	MANYAR	122.645	95,42	1.285,32
11	CERME	83.903	71,73	1.169,71
12	BUNGAH	69.581	79,44	875,89
13	MENGANTI	133.875	68,72	1.948,12
14	KEBOMAS	115.078	30,06	3.828,28
15	DRIYOREJO	108.924	51,29	2.123,69
16	GRESIK	80.005	5,54	14.441,34
17	SANGKAPURA	54.311	118,72	457,47
18	TAMBAK	31.009	78,7	394,02
	JUMLAH	1.327.497	1.191,25	1.114,37

Gambar 1.3 Data Kependudukan di Kabupaten Gresik Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

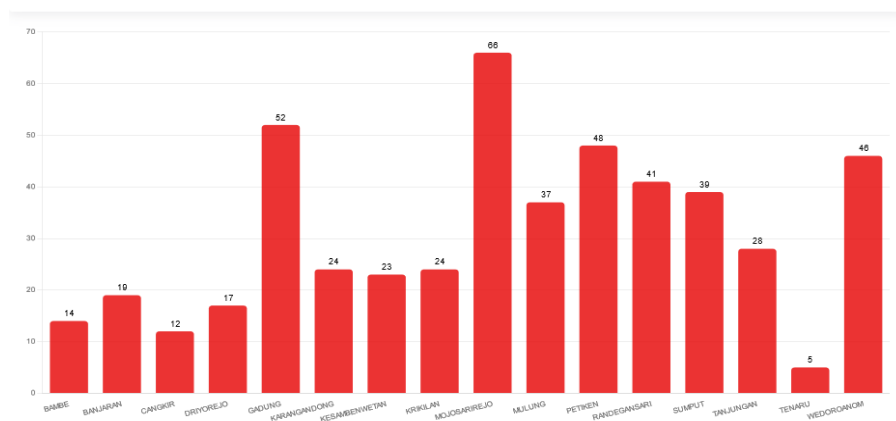
Diakses pada 01 Maret 2025

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa kepadatan penduduk di suatu daerah dapat mempengaruhi

tingginya jumlah anak yang mengalami stunting. Terkait hal ini, berikut adalah pernyataan dari Ibu dr. Anik, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik:

“..... Kabupaten Gresik kan memang kota industri, Mbak. Otomatis banyak perantau yang datang kesini untuk bekerja, dan menjadikan kepadatan penduduk serta tingginya mobilisasi. Banyak juga dari perantau itu membawa istri dan anaknya. Nah, kalau perantau itu bawa anaknya tapi sudah kena stunting di daerah asalnya, kemudian pindah ke Kabupaten Gresik kan pastinya angka stunting disini juga ikut meningkat” (Hasil wawancara 4 November, 2024).

Angka stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2022-2025 berada di angka 3.373 kasus dan wilayah dengan kasus tertinggi yaitu Kecamatan Driyorejo, khususnya pada Desa Mojosarirejo yang mempunyai angka stunting hingga 66 kasus yang menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi di Kabupaten Gresik. Data tersebut dapat dilihat melalui *website* Gresik Urus Stunting (GUS) yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Berikut data prevalensi stunting berdasarkan desa di Kecamatan Driyorejo pada tahun 2022-2025:



Gambar 1.4 Data Prevalensi Stunting Berdasarkan Desa di Kecamatan Driyorejo

Sumber: Gresik Urus Stunting (GUS)

Diakses pada 07 November 2024

Merujuk pada data tersebut, Desa Mojosarirejo yang terletak di Kecamatan Driyorejo merupakan salah satu daerah perbatasan Kabupaten Gresik dengan wilayah kota lainnya. Banyaknya perumahan disana, mengakibatkan banyaknya penduduk dari luar kota yang menjadi pekerja di Kabupaten Gresik. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Mojosarirejo mengenai bahaya stunting dan kurangnya pengetahuan terkait cara pola asuh anak yang efektif.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat upaya penurunan angka stunting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya tercermin melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu faktor guna menunjukkan tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesehatan, pendapatan dan pendidikan (Sapaat, 2020). Tiga indikator utama yang digunakan untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi: pertama, harapan hidup, yang dihitung berdasarkan rata-rata harapan hidup suatu populasi atau negara. Kedua, aspek pengetahuan diukur melalui rata-rata tertimbang antara proporsi orang dewasa yang tingkat literasi serta durasi rata-rata pendidikan yang dijalani. Ketiga, aspek penghasilan dinilai dengan mengacu pada pendapatan riil per kapita yang telah dikoreksi menggunakan paritas daya beli tiap negara. (Siswati & Hermawati, 2018). Apabila masyarakat terinformasi dengan baik, hidup sehat serta memiliki taraf hidup layak, maka kabupaten/kota dapat secara efektif meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apabila masyarakat memiliki kesehatan yang berkualitas, maka IPM akan meningkat.

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mempercepat penurunan angka stunting adalah melalui penerbitan berbagai kebijakan melalui Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi. Dalam pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pilar dalam strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di daerah dan pemerintah desa, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di pemerintah daerah dan pemerintah desa, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.”

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui percepatan penurunan stunting, Kabupaten Gresik khususnya pada Desa Mojosarirejo terus gencar dalam meningkatkan komunikasi sesuai dengan poin kedua pada lima pilar strategi percepatan penurunan stunting. Komunikasi yang dimaksudkan yaitu adanya kolaborasi antar *stakeholder*, atau pemerintah Kabupaten Gresik memerlukan penerapan *collaborative governance* yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama, yaitu percepatan penurunan stunting, karena pemerintah dengan *stakeholder* terkait bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan harus bekerja bersama demi kesejahteraan masyarakat (Salsabila & Santoso, 2024). *Collaborative governance* adalah skema kerja sama yang dirancang secara sistematis dan melibatkan berbagai sektor dan organisasi, di mana pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat saling berkolaborasi untuk mencapai kesepakatan dan mengambil keputusan bersama.

Proses ini melibatkan interaksi formal dan informal untuk mencapai konsensus dan menghasilkan hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Oleh karena itu, semua *stakeholder* memiliki kedudukan yang sama dalam proses kolaborasi (Nur et al., 2022).

Dalam kolaborasi tersebut, Puskesmas berperan sebagai representasi dari unsur pemerintah, yang berfungsi sebagai penggerak bagi para *stakeholder* lainnya dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah kerjanya. Di Kecamatan Driyorejo sendiri terdapat dua Puskesmas, yakni Puskesmas Driyorejo dan Puskesmas Karang Andong. Desa Mojosarirejo merupakan desa di wilayah kerja Puskesmas Karang Andong, desa tersebut merupakan desa dengan angka stunting yang paling tinggi, oleh karena itu Puskesmas Karang Andong menggandeng *stakeholder* lainnya untuk percepatan penurunan stunting.

Sektor swasta yang terlibat dalam kolaborasi ini adalah PT Garuda Food Putra Putri Jaya, yang berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa Mojosarirejo. Selama dua tahun terakhir, upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan ini meliputi pemberian bantuan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) seperti susu formula dan biskuit dari produk mereka. Sistem dari *stakeholder* ini dalam memberikan bantuan tersebut yaitu mereka memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut kepada balita yang terkena stunting setiap bulannya, apabila balita tersebut sudah dinyatakan lulus dari stunting maka bantuan tersebut digantikan oleh balita stunting yang lainnya.

Lembaga sosial kemasyarakatan di Desa Mojosarirejo yang turut berperan besar dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Lembaga ini melakukan kegiatan pelacakan

stunting yang memungkinkan untuk mengidentifikasi penyebab balita stunting di masyarakat serta melaksanakan pendekatan yang tepat dalam penanggulangannya. Selain itu, PKK juga melakukan kegiatan lainnya seperti pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dengan adanya kolaborasi dari beberapa *stakeholder* tersebut, prevalensi stunting di Desa Mojosarirejo diharapkan bisa turun, agar prevalensi stunting di Kabupaten Gresik bisa berhasil turun hingga mencapai 10% bahkan menjadi wilayah bebas stunting berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2023 pada pasal 7 ayat (1). Pada proses kolaborasi tentunya ada tantangan yang dihadapi oleh *stakeholder*, seperti masih banyaknya pengangguran, walaupun Kabupaten Gresik menjadi salah satu kota industri. Hal ini terjadi karena industri di Kabupaten Gresik banyak menyerap tenaga kerja dari luar daerah sesuai keterampilan dan skill yang dibutuhkan. Kondisi inilah yang mengakibatkan masyarakat mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga untuk mengakses makanan yang bergizi akan lebih sulit. Tantangan lainnya yaitu banyaknya pencemaran lingkungan, seperti polusi udara dan kurangnya sanitasi yang baik. Beberapa faktor ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Gresik terus meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Mojosarirejo.

Suatu kebijakan publik bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya dukungan dari masyarakat, karena mereka yang akan terpengaruh langsung oleh kebijakan tersebut. Pada kenyataannya, masyarakat Desa Mojosarirejo masih banyak melakukan resistensi atau penolakan apabila anaknya diberikan makanan

tambahan oleh petugas. Mereka menganggap anaknya tidak terkena stunting, karena dirinya mampu dalam mengakses makanan bergizi. Padahal faktor penyebab stunting tidak harus terkait makanan yang bergizi, melainkan bisa dari pola asuh orang tua yang kurang efektif. Adanya fenomena tersebut berarti kejadian di lapangan yang sebenarnya (*das sein*) dan hal yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) tidak sesuai.

Penelitian ini dilakukan sebagai respon terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jonathan et al., 2024) dengan judul Strategi Komunikasi Kebijakan dalam Program Penurunan Stunting di Kecamatan Medan Selayang pada tahun 2024. Hasil penelitian terdahulu tersebut menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan yang dijadikan sebagai *research gap* dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Kesenjangan tersebut adalah koordinasi serta komunikasi yang kurang optimal, sehingga diperlukan penelitian yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai percepatan penurunan stunting di Desa Mojosarirejo yang pada akhirnya mengarah pada kerja sama atau kolaborasi yang lebih baik melalui *collaborative governance*. Kolaborasi antar *stakeholder* akan dapat mendorong percepatan penurunan angka stunting. Karena bahwa kolaborasi, komitmen, dan dukungan dari *stakeholder* penting dalam pelaksanaan program maupun kebijakan untuk membantu menyelesaikan masalah dan mewujudkan tujuan. Hal ini menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti dan diharapkan dapat menghasilkan *output* yang baik dari *collaborative governance* yang dilakukan *stakeholder* di Desa Mojosarirejo. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan generasi muda yang

sehat, cerdas, produktif, dan berkualitas di wilayah tersebut, sekaligus berkontribusi secara positif dalam peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia.

Urgensi upaya percepatan penanggulangan stunting selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2023, yang menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga mencapai 10% pada tahun 2024. Namun, saat ini Kabupaten Gresik masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kepadatan penduduk, meningkatnya mobilitas, pencemaran yang menyebabkan sanitasi buruk, faktor ekonomi, ditambah dengan minimnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pola asuh yang tepat. Sehingga untuk mempersiapkan hal tersebut perlu dilakukan *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting. Jika kerja sama atau kolaborasi berjalan dengan baik, maka penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Gresik juga bisa berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian yang membahas mengenai *collaborative governance* dalam percepatan penurunan angka stunting di Desa Mojosarirejo, dengan menggunakan teori (Ansell & Gash, 2008) sebagai solusi yang relevan dalam mengatasi permasalahan tersebut, karena menurut Ansell dan Gash dalam (Arrozaaq, 2016) teori ini menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan tata kelola yang relatif baru, yang menyatukan para pembuat kebijakan dalam satu forum untuk mencapai keputusan bersama. Pendekatan ini menitikberatkan pada kerja sama lintas sektor melibatkan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan, seperti penurunan angka stunting. Di sisi lain, teori ini juga berupaya mengembangkan model yang menjelaskan bagaimana proses

kolaboratif berlangsung. Melalui sinergi antar pemangku kepentingan, kolaborasi ini ditujukan untuk memberikan peran nyata dalam strategi pengendalian stunting. Proses kolaborasi menurut (Ansell & Gash, 2008) terdiri dari lima tahapan, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil menengah. Dengan demikian, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait judul “Tata Kelola *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting di Desa Mojosarirejo Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, dapat dirumuskan bahwa pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah "Bagaimana tata kelola *collaborative governance* dalam percepatan penurunan angka stunting di Desa Mojosarirejo Kabupaten Gresik?"

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami mengenai tata kelola *collaborative governance* dalam percepatan penurunan angka stunting di Desa Mojosarirejo Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- A. Untuk memperluas pengetahuan para peneliti yang melakukan penelitian serupa di kemudian hari dan menambah bacaan ilmiah di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik;
- B. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola *collaborative* dalam percepatan penurunan angka stunting di Desa Mojosarirejo Kabupaten Gresik.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman terkait tata kelola *collaborative* dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Desa Mojosarirejo, Kabupaten Gresik.

B. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mendukung penelitian lainnya, memberikan bahan perbandingan untuk penelitian sejenis di masa depan, serta memperkaya koleksi referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik.

C. Bagi Puskesmas Karangandong

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi, kontribusi pemikiran, serta informasi yang bermanfaat guna memperkuat tata kelola

collaborative dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa Mojosarirejo, Kabupaten Gresik.